



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3402-3416

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari)

Shafarita Fajar Aryani^{1✉}, Judi Budiman²

Universitas Islam Sultan Agung

Email: syafaritafajar@std.unissula.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perpajakan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memperlancar pembangunan nasional sebagai sumber utama penerimaan negara. Reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui modernisasi sistem administrasi dan penyelarasan Nomor Pokok Penduduk (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyelarasan NIK dengan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik asosiatif kausal, dengan melibatkan 100 responden wajib pajak yang dipilih secara purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 26.0, setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyelarasan NIK dengan NPWP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap sistem administrasi dan integrasi data identitas secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menyiratkan perlunya peningkatan sosialisasi dan perbaikan sistem untuk mencapai target penerimaan pajak nasional secara optimal.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pemadanan NIK, NPWP, KPP Pratama Semarang Gayamsari*

Abstract

Taxation has a pivotal function in facilitating national development as the primary source of government revenue. The tax administration reform implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) through the modernization of the administrative system and the alignment of the Population Identification Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP) is anticipated to enhance compliance among Individual Taxpayers (WP). This study seeks to examine the impact of modernizing the tax administration system and aligning the NIK with the NPWP on taxpayer compliance at the Semarang Gayamsari Pratama Tax Office. A quantitative methodology employing the causal-associative technique was utilized, involving 100 taxpayer respondents selected by purposive sampling. Primary data were gathered by a questionnaire and analyzed via multiple linear regression using SPSS 26.0, following the completion of validity, reliability, and classical assumption assessments. The study's results demonstrate that the two independent variables, specifically the modernization of the tax administration system and the alignment of NIK with NPWP, exert a considerable beneficial influence on the compliance of Individual Taxpayers. This discovery suggests that accessibility to the administrative system and the integration of identity data significantly enhance tax compliance. This research implies the necessity to enhance socialization and improve the system to optimally accomplish the national tax revenue target.

Keywords: Fulfillment Of Taxpayers, Modernization Of Tax Administration, Matching NIK, NPWP, KPP Pratama Semarang Gayamsari

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara yang mendukung pembangunan Indonesia, sesuai UU No. 16 Tahun 2009 yang menyatakan pajak sebagai kontribusi wajib tanpa imbalan langsung. Sekitar 75% APBN berasal dari pajak, terutama PPh dan PPN. Pada 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.869 triliun, naik 8,9% dari tahun sebelumnya. Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting dalam sistem self-assessment, di mana WP menghitung dan melapor pajak secara mandiri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas membuat kebijakan yang jelas dan mudah dipahami untuk mendorong kepatuhan ini.

DJP juga telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem elektronik seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-SPT untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan, memungkinkan WP mengurus pajak secara online tanpa harus ke kantor pajak. Modernisasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan pajak. Dengan reformasi dan teknologi ini, Indonesia terus mengembangkan sistem perpajakan yang adaptif dan efektif untuk mencapai target penerimaan negara.

Tabel 1. Jumlah WPOP di KPP Pratama Semarang Gayamsari

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP aktif	Persentase
2021	6.003	1.692	28,18 %
2022	6.806	3.345	49,14 %
2023	5.637	3.242	57,51 %

Sumber : KPP Pratama Semarang Gayamsari

Data dari KPP Pratama Semarang Gayamsari menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) Data dari KPP Pratama Semarang Gayamsari menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dalam melaporkan SPT meningkat dari 28,18% pada 2021 menjadi 49,14% di 2022, dan 57,51% pada 2023, meskipun angka ini belum mencerminkan kepatuhan penuh. Ariani & Syamsurizal (2022), Lonto et al. (2023), dan Tambunan & Banjarnahor (2023) menegaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan WP karena teknologi mempermudah layanan dan meningkatkan efisiensi. Tobing & Kusmono (2022) menambahkan bahwa masyarakat lebih memilih sistem yang sederhana, sehingga penyederhanaan identitas WP diperlukan.

Sebagai respons, pemerintah menerapkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem Single Identity Number (SIN), sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan PMK No.112/PMK.03/2022. Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon (2023) menyatakan bahwa integrasi ini memudahkan pencatatan transaksi berbasis NIK dan mendukung sistem self-assessment. Namun, hingga akhir 2023, baru 82,52% WP yang melakukan pemadanan, sehingga pemerintah memperpanjang masa validasi melalui PMK No.136/PMK.03/2023.

Novia et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem SIN berpengaruh positif pada kepatuhan WP, terutama dengan dukungan pengetahuan perpajakan, tetapi preferensi risiko dapat melemahkan pengaruh tersebut. Sementara itu, Aribowo et al. (2024) dan Soemartono et al. (2023) menemukan bahwa integrasi NIK belum berdampak signifikan karena rendahnya pemahaman regulasi dan hambatan administratif yang muncul.

Penelitian ini mengembangkan studi Lonto et al. (2023) dengan menambahkan variabel pemadanan NIK sebagai NPWP dan memfokuskan pada WP Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari, berbeda dari studi sebelumnya yang berfokus pada KP2KP. Judul penelitian ini adalah "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari)".

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari. (2) Menganalisis pengaruh pepadanan NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan kausal-asosiatif, yang sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022), mengutamakan perolehan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis secara objektif dan metodis. Pendekatan kausal-asosiatif dipilih untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen.

Populasi penelitian adalah 130.629 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Sampel sebanyak 100 WP diambil menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan teknik purposive sampling, yaitu memilih WP yang telah memiliki NPWP sebelum kebijakan pepadanan NIK-NPWP dan sudah melakukan pepadanan tersebut.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berisi pertanyaan tertutup yang mencakup informasi demografis serta variabel independen dan dependen, dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Variabel bebasnya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyelarasan NIK dengan NPWP, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.

Analisis data dilakukan dengan SPSS 26.0. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam tabel dan grafik. Validitas kuesioner diuji dengan corrected item-total correlation dan dibandingkan dengan nilai r tabel, sedangkan reliabilitas diuji dengan Cronbach's Alpha ($\alpha > 0,70$). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (P-P Plot dan Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi $> 0,05$), uji multikolinearitas (tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10), dan uji heterokedastisitas (uji Glejser) untuk memastikan model regresi yang baik.

Analisis regresi linear berganda digunakan dengan model $KWP = a + \beta_1 MSA + \beta_2 PNN + e$, di mana KWP adalah kepatuhan WP, MSA modernisasi sistem administrasi, PNN pepadanan NIK sebagai NPWP, a konstanta, β koefisien regresi, dan e error.

Uji statistik F dilakukan untuk menilai dampak serentak faktor-faktor independen terhadap variabel dependen, dengan ambang signifikansi $< 0,05$ yang menunjukkan pengaruh signifikan. Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana variabel independen

menjelaskan perubahan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai sekitar 1 yang menandakan daya penjelasan yang kuat.

Terakhir, uji t digunakan untuk menguji pengaruh individual setiap variabel bebas terhadap kepatuhan WP. Hipotesis nol menyatakan tidak ada pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan pengaruh positif. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan ditolak jika $> 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari. Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem MFWP KPP tersebut, terdapat sebanyak 130.629 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat aktif. Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (error level) sebesar 10%. Hasil perhitungan menghasilkan sampel sebesar 100 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum kebijakan pepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP, dan telah melakukan proses pepadanan tersebut.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung selama periode 17 hingga 27 Februari 2025, dengan jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 130 dan jumlah kembali yang valid sebanyak 101.

Dari identitas responden, diketahui bahwa mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebesar 67,3% dari total 101 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pajak secara langsung di KPP Pratama Gayamsari cenderung lebih banyak dilakukan oleh Wajib Pajak perempuan. Dari sisi usia, kelompok usia 21–30 tahun mendominasi dengan proporsi 36,6%, diikuti kelompok usia 31–40 tahun (25,7%) dan 41–50 tahun (23,8%). Hanya 13,9% responden yang berada pada usia di atas 50 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merupakan Wajib Pajak usia produktif.

Dari segi pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 53,5%. Sementara itu, responden dengan pendidikan SMA/ sederajat berjumlah 26,7%, dan Diploma 15,8%. Hanya 4% responden yang memiliki pendidikan terakhir pada jenjang Pascasarjana. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden merupakan individu dengan latar belakang pendidikan tinggi.

Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden adalah karyawan swasta, yaitu sebanyak 42 orang atau 41,6% dari total responden. Selanjutnya, responden yang berprofesi sebagai wiraswasta berjumlah 27 orang (26,7%). Beberapa responden juga berprofesi sebagai PNS (7,9%), serta guru, pegawai BUMN, dan wirausaha masing-masing sebanyak 5 responden (5%). Selain itu, terdapat responden yang berstatus freelance dan mahasiswa masing-masing sebanyak 3%, sementara profesi seperti dosen, ibu rumah tangga (IRT), dan pegawai non-ASN BLUD tercatat sebagai kelompok dengan jumlah paling sedikit.

Secara keseluruhan, karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan keragaman dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Namun, dominasi dari kelompok usia produktif, tingkat pendidikan tinggi, dan keterlibatan aktif pekerja sektor swasta menunjukkan bahwa responden memiliki kapabilitas dalam memahami dan merespons kebijakan perpajakan yang tengah dikaji, khususnya kebijakan pepadanan NIK dan NPWP.

Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviation
Kepatuhan WPOP	101	18	35	29,82	30	3,853
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	101	12	35	27,95	28	5,011
Pepadanan NIK Sebagai NPWP	101	18	45	36,64	36	6,131
Valid N (<i>listwise</i>)	101					

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil jawaban kuesioner responden berdasarkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dijabarkan sebagai berikut.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki tujuh kategori, dengan skor minimum 18 dan skor maksimum 35. Nilai rata-ratanya adalah 29,82, mediannya adalah 30, dan simpangan bakunya adalah 3,853. Nilai rata-rata di atas simpangan baku menunjukkan bahwa variasi datanya kecil dan distribusi variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagian besar seragam.

Untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, yang juga terdiri dari 7 item pertanyaan, skor terendah adalah 12 dan skor tertinggi mencapai 35. Nilai rata-rata

yang diperoleh adalah 27,95 dengan median 28 dan standar deviasi 5,011. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, hal ini menandakan penyimpangan data rendah dan distribusi data pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan relatif merata.

Sementara itu, variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP terdiri dari 9 item pertanyaan dengan skor minimum 18 dan maksimum 45. Nilai rata-rata variabel ini adalah 36,63 dengan median 36 dan standar deviasi sebesar 6,131. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa penyimpangan data juga rendah dan data pada variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP tersebar secara merata.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	R Hitung	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,653	0,000	Valid
	Y2	0,649	0,000	Valid
	Y3	0,735	0,000	Valid
	Y4	0,822	0,000	Valid
	Y5	0,798	0,000	Valid
	Y6	0,800	0,000	Valid
	Y7	0,566	0,000	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,780	0,000	Valid
	X1.2	0,766	0,000	Valid
	X1.3	0,743	0,000	Valid
	X1.4	0,850	0,000	Valid
	X1.5	0,816	0,000	Valid
	X1.6	0,769	0,000	Valid
	X1.7	0,773	0,000	Valid
Pemadanan NIK sebagai NPWP (X2)	X2.1	0,798	0,000	Valid
	X2.2	0,861	0,000	Valid
	X2.3	0,875	0,000	Valid
	X2.4	0,834	0,000	Valid
	X2.5	0,843	0,000	Valid
	X2.6	0,826	0,000	Valid
	X2.7	0,781	0,000	Valid
	X2.8	0,797	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil pengujian diatas, kuesioner dari 3 variabel dengan total 23 item pertanyaan kuesioner sudah diisi oleh 101 responden pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tabel r dan didapatkan hasil r tabel = 0,1956. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa r hitung > 0,1956 dengan signifikansi < 0,05 oleh karena itu kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

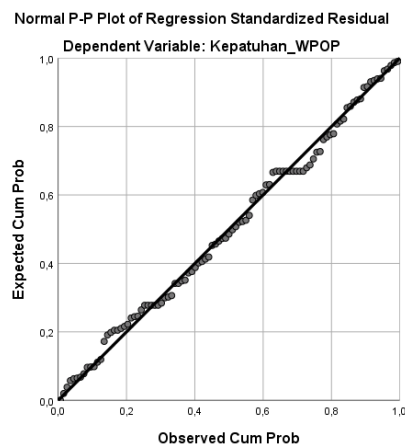
Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	7	0,810	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	7	0,889	Reliabel
Pemadanan NIK sebagai NPWP (X2)	9	0,942	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

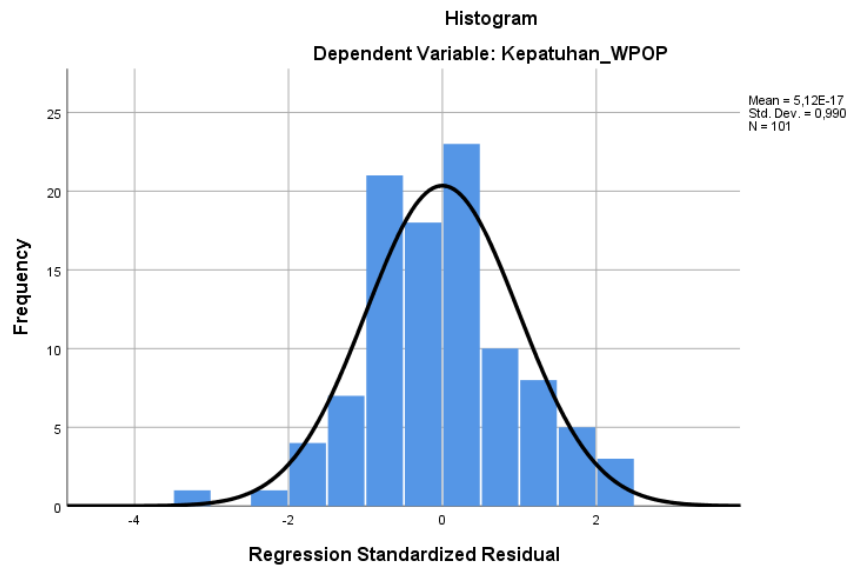
Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel bernilai >0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian dinyatakan reliabel ataupun bisa dipercaya dan sudah memenuhi uji reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normal Probability Plot



Gambar 2. Hasil Histogram Uji Normal Probability Plot

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		101
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,77868558
Most Extreme Differences	Absolute	0,53
	Positive	0,53
	Negative	-0,50
Test Statistics		0,53
Asymp. Sig. (2-tailed).		0,200

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa model regresi memenuhi anggapan normal dimana titik-titik pada garis data menyebar mengikuti diagonal garis. Pengujian histogram normal probability plot juga mendapati hasil yang sesuai serta didukung dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikansi $0,20 > 0,05$. Melalui uji normal probability plot, histogram, dan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat disimpulkan bahwa dalam variabel pengganggu dalam model regresi terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Colinearity Tolerance</i>	VIF
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,462	2,164
Pemadanan NIK sebagai NPWP	0,462	2,164

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh nilai *Colinearity Tolerance* > 0,10 dan seluruh nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 tidak terjadi multikolinearitas dan korelasi antara variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	sig
1	(Constant)	4,785	1,045		4,577	0,000
	Modernisasi Sistem Administrasi	-0,081	0,049	-0,239	-1,668	0,099
	Pemadanan NIK-NPWP	-0,009	0,040	-0,033	-0,227	0,821

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai signifikansi kedua variabel > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	sig
1	(Constant)	13,193	1,771		7,450	0,000
	Modernisasi Sistem Administrasi	0,232	0,082	0,301	2,813	0,006
	Pemadanan NIK-NPWP	0,277	0,067	0,441	4,113	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Persamaan regresi dari tabel uji regresi diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,193 + 0,232X_1 + 0,277X_2 + e$$

Adapun penjelasan mengenai hasil regresi linear berganda diuraikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 13,193 mendefinisikan apabila variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pemadanan NIK sebagai NPWP konstan, maka dinyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 13,193.
- Variabel Modernisasi Sistem Administrasi menghasilkan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,232 dengan signifikansi 0,006. Sehingga dapat disimpulkan apabila Modernisasi Sistem Administrasi bertambah satu tingkat maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, dengan asumsi nilai koefisien variabel independennya tetap.
- Variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,277 dengan signifikansi 0,000 artinya apabila Pemadanan NIK sebagai NPWP meningkat maka dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan asumsi koefisien variabel independennya tetap.

Uji *Goodness of Fit Model*

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Regresi	F hitung	0,000
	F	signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 serta nilai F hitung 45,229 > F tabel 3,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel yang terdiri dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) dan Pemadanan NIK sebagai NPWP (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Kategori	R	R Square	Adjusted R Square
Uji R	0,693	0,480	0,469

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Nilai R Square seperti terlihat pada tabel di atas adalah sebesar 0,469 atau setara dengan 46,9%. Faktor Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesesuaian NIK

dengan NPWP secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,9%.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual berdampak secara signifikan pada variabel dependen. Apabila nilai $\beta > 0$ dengan signifikansi $t < 0,05$ maka variabel bebas memiliki dampak yang signifikan pada variabel dependen, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 10, diketahui bahwa nilai β variabel Modernisasi Sistem Administrasi 0,301 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang artinya terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan.

Adapun nilai β untuk variabel Pematangan NIK sebagai NPWP sebesar 0,441 dengan arah positif dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima yang artinya terdapat pengaruh Pematangan NIK sebagai NPWP (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai β sebesar 0,301 untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang menunjukkan korelasi positif dengan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis satu diterima yang menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi modernisasi sistem perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Lonto et al., 2023) dan (Ariani & Syamsurizal, 2022) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi, wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja secara luring.

Pengaruh Pemadanan NIK Sebagai NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa Pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Dibuktikan dengan nilai β untuk variabel Pemadanan NIK sebagai NPWP sebesar 0,441 arah positif dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis dua diterima yang artinya Pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemadanan NIK sebagai NPWP sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemadanan NIK sebagai NPWP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan SIN (*Single Identity Number*) dimana setiap warga negara hanya perlu menggunakan satu nomor identitas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yakni penelitian (Novia et al., 2023) dan (Asnifah & Fahriani, 2024) yang menunjukkan bahwa pemadanan NIK sebagai NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pemadanan NIK sebagai NPWP membantu wajib pajak dalam mengurus administrasi perpajakan dan memenuhi kewajiban pajaknya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyelarasan NIK dengan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 101 responden dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi sistem administrasi memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan

demikian, peningkatan akses terhadap sistem administrasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor pepadanan NIK sebagai NPWP terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pepadanan NIK sebagai NPWP ini meringkas dokumen untuk keperluan administrasi perpajakan serta sebagai perwujudan diterapkannya SIN (Single Identity Number). Semakin banyak kemudahan yang diberikan tentu membuat wajib pajak semakin meningkat kepatuhan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Ayuningtyas, & Imahda Khoiri Furqon. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Ariani, M., & Syamsurizal. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Transparansi Informasi , Modernisasi Teknologi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 111–130.
- Aribowo, I., Kusuma, I. G. K. C. B. A., Suryono, A., Muluk, M. R. K., & Wijaya, A. F. (2024). Integration Of Population Identification Number (NIK) As Taxpayer Identification Number (NPWP) For Optimizing Tax Compliance: Case Study At Pondok Aren Pratama Tax Service Office. *Educoretax*, 4(3), 341–349. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i3.747>
- Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pepadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616–4628. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4301>
- Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 72–80. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>
- Novia, N. A., Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483–495. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>

- Soemartono, T., Minarni, S., Dewi, K. S., & Setiotirin, R. W. (2023). Challenges of Coordination and Public Understanding in Implementing Nik and Npwp Integration Policies. *Iccd*, 5(1), 724–736. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.654>
- Sugiyono, D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Penerbit Alfabeta* (19th ed.). Alfabeta Bandung.
- Tambunan, R. R., & Banjarnahor, H. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(1), 69–74. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.4912>
- Tobing, E. G. L. (2022). *Tinjauan Penerapan Nomor Induk Kependudukan Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak Berdasarkan Asas Kesederhanaan dan Kemanfaatan* [Politeknik Keuangan Negara STAN]. <http://eprints.pknstan.ac.id/1253/>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>